



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Meningkatkan Sistem E-Government di Indonesia: Perbandingan dengan Sistem NemID Denmark

Ulfah Fauziah, Ibrahim Aziz Harahap

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Airlangga No.4-6, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60286,
Telp: +6231-5023151, Fax: +6231-5020454
Email : ulfah.fauziah-2022@fh.unair.ac.id

Article

Article History

Received: Sepp 19, 2023;
Reviewed: Sep 29, 2023;
Nov 07, 2023;
Accepted: Jan 27, 2024;
Published: Mar 28, 2024:

DOI:

10.33474/yur.v7i2.20532

Abstract

The Indonesian government provides public services through an e-government system carried out over the network websites, applications, or social media. This is done so that people can no longer visit government offices to handle various administrative needs. This paper aims to discuss the shortcomings and advantages of developing e-government in Indonesia and the factors that cause lag in the development of e-government development in Indonesia. This research uses functional method legal research using a comparative study conducted with the aim of reconstruction, namely showing a study and comparison of the e-government system from Denmark as a comparison country with Indonesia. The Indonesian government can see Denmark's success in achieving e-government, which is supported by collaboration between the government and the private sector; with this collaboration, the government can maximize public services to the community.

Keywords: *E-government; Public Service; Government*

Abstrak

Pemerintah Indonesia memberikan layanan publik melalui sistem *e-government* yang dilakukan melalui jaringan situs web, aplikasi, atau media sosial. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus mendatangi kantor-kantor pemerintah untuk mengurus berbagai keperluan administratif. Upaya Indonesia dalam mewujudkan *e-government* terus diperbaharui dan dikembangkan. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam

proses pengembangan *e-government* di Indonesia dan faktor yang menyebabkan ketertinggalan dalam pengembangan pembangunan *e-government* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum metode fungsional dengan menggunakan studi komparasi yang dilakukan dengan tujuan rekonstruksi, yakni melakukan kajian dan perbandingan terhadap sistem *e-government* dari Negara Denmark sebagai negara pembanding dengan Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat melihat keberhasilan Denmark dalam mencapai *e-government* yang didukung dengan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, dengan adanya kerjasama itu pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kata Kunci: *E-government*; Pelayanan Publik; Pemerintahan

PENDAHULUAN

Sistem *e-government* dimulai pada tahun 2003 yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.¹ Pada praktiknya implementasi sistem *e-government* juga menghadirkan tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh Indonesia karena keadaan geografis Indonesia yang begitu luas menjadikan tantangan ini berat untuk diupayakan oleh pemerintah.² Hal ini juga menjadi penilaian yang didasarkan pada hasil survei *United Nation* (UN) yang dilakukan kepada 193

negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2020,³ menempatkan Indonesia pada peringkat 88 dengan skala 0,716 poin.⁴ Sukses *e-government* di Indonesia masih harus terus dikembangkan, dalam mewujudkan *e-government* sebagai terobosan dalam pelayanan publik berbasis elektronik, tentunya pemerintah tetap harus memperhatikan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.⁵

Penelitian terdahulu yang di tulis oleh Verdico Arief yang berjudul "*E-government* di Asia Tenggara: Perbandingan Pengembangan *e-government* di Singapura,

¹ Desy Setyowati, "Kominfo Luncurkan Kembali Portal Indonesia.go.id - Katadata.co.id," Katadata.co.id, diakses 23 Desember 2023, <https://katadata.co.id/digital/nasional/5e9a558d0d5e6/kominfo-luncurkan-kembali-portal-indonesiagoid>.

² Nurfaika Ishak, "Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (30 Juni 2022): 72, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834>.

³ Aniqotul Ummah, Siti Maryam, dan Danis Tri Saputra Wahidin, "E-Government Implementation to Support Digital Village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency," *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 6 (2022): 247.

⁴ Humas MENPANRB, "Indonesia Naik 11 Peringkat hasil Survei E-government PBB," menpan.go.id, 2022, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-11-peringkat-hasil-survei-e-government-pbb>.

⁵ Wendra Afriana dkk., "E-Government Effectiveness in Combating Corruption and Improving Public Service," *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 01 (2020): 35.

Malaysia dan Indonesia” mencakup bahasan mengenai pemanfaatan *e-government* sebagai alat bantu untuk mereformasi serta memodernisasi negara dengan fokus membangun sektor digital ekonomi, melakukan digitalisasi semua sektor pemerintahan, dan menciptakan masyarakat yang paham terhadap teknologi digital. Adapun tulisan ini fokus mengkaji kekurangan dan kelebihan dalam proses pengembangan *e-government* di Indonesia dan Denmark; dan apa yang menjadi faktor ketertinggalan dalam pengembangan pembangunan *e-government* di Indonesia.

Adapun urgensi dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah dalam hal pelayanan publik. Pada saat ini pelayanan publik di Indonesia dapat dikatakan sangat sulit, hal ini dapat terjadi dikarenakan banyaknya akses atau tahapan dalam pengurusan administrasi baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Sehubungan dengan persoalan di atas, agar tidak meluasnya pembahasan maka diperlukan perumusan permasalahan yakni Apa kekurangan dan kelebihan dalam proses pengembangan *e-government* di Indonesia dan Denmark; dan apa yang menjadi faktor

ketertinggalan dalam pengembangan pembangunan *e-government* di Indonesia. Kedua permasalahan yang dirumuskan di atas diharapkan dapat ditemukan jawaban yang relevan, baik dan jelas mengenai apa yang menjadi penyebab ketertinggalan Indonesia dalam menerapkan sistem *e-government* dan apa saja proses yang perlu di evaluasi dalam pengembangan penerapan sistem *e-government* di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode fungsional (*functional method*).⁶ Metode fungsional dalam studi komparasi mengenai *e-government* antara Negara Indonesia dan Negara Denmark akan berfokus pada tujuan yang dicita-citakan dari diterapkannya sistem *e-government* di Negara Indonesia.⁷ Dalam studi ini perbandingan dilakukan secara mikro⁸ dengan membandingkan efisiensi dan efektifitas sistem *e-government* yang telah diterapkan oleh kedua negara yang bersangkutan dalam mencapai tujuannya, seperti halnya pelayanan publik, transparansi pemerintah,⁹ partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan lain sebagainya. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan dari dua objek atau lebih¹⁰

⁶ Ralf Michaels, *The Functional Method of Comparative Law* (Carolina Utara: Duke Law School, 2006), 340.

⁷ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni Bandung, 1979), 69.

⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 32.

⁹ Endang Try Setyasih, “Implementation of Good Governance in Public Services in Blanakan District, Subang Regency,” *Endless: International Journal of Future Studies* 6, no. 1 (23 Februari 2023): 152, <https://endless-journal.com/index.php/endless/article/view/133>.

¹⁰ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, ed. oleh Irfani dan Erham Amin (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), 12.

yang hasilnya dapat dijadikan landasan perumusan regulasi.¹¹

Tujuan penulisan ini adalah untuk merekonstruksi *e-government*, yakni secara spesifik menemukan bahan-bahan hukum yang berlainan dan terefleksi dengan teridentifikasinya faktor-faktor persamaan dan perbedaan dari data-data tersebut.¹² Melakukan kajian dan perbandingan terhadap sistem *e-government* dari Negara Denmark sebagai negara pembanding dengan Negara Indonesia. Selain itu menemukan pembaharuan dan menjadi suatu evaluasi dari sistem *e-government* yang sudah ada di Indonesia

PEMBAHASAN

Sistem E-Government di Negara Denmark

Pada tahun 2016 Pemerintah Denmark mengamanatkan kepada seluruh warganya untuk mengakses pelayanan publik melalui *online*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan digital dimana warga dapat mengambil manfaat sebanyak mungkin dari pembangunan infrastruktur digital oleh pemerintah.¹³ Setiap warga negara diwajibkan

untuk beralih pada layanan *online* dan menerima *e-mail* pengalihan pos fisik, pengecualian hanya boleh bagi warga Denmark yang tidak berbahasa Denmark, penyandang disabilitas atau warga negara yang tidak memiliki alat elektronik.¹⁴

Layanan tersebut tentunya tidak lepas daripada koordinasi pemerintah dari tiap lembaga pelayanan publik mulai dari tingkat daerah hingga pada tingkat nasional. Pemerintah dapat memberikan fasilitas digital yang maksimal bagi warga negaranya sehingga hal itu bermuara pada tercapainya suatu cita-cita *good governance*.¹⁵ Tak hanya dalam hal pemerataan infrastruktur digital, pemerintah juga memiliki peran untuk mengadakan suatu pelatihan penggunaan teknologi digital bagi warga kalangan paruh baya dengan melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat demi meratanya literasi digital. Hal ini memberikan sebuah perspektif bahwa amanat yang disampaikan oleh pemerintah kepada warganya wajib dilaksanakan oleh seluruh kalangan ataupun

¹¹ Maria Ulfah, *Perbandingan Sistem Hukum* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022), 121.

¹² Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, ed. oleh 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 126.

¹³ Mariam Mariam dan Imanudin Kudus, "Analisis Penerapan Electronic Government (E-Gov) Di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung," *Neo Politea* 3, no. 2 (12 Agustus 2022): 33, <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v3i2.1081>.

¹⁴ Ardika Santosa, "Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?," *Jasa Pembuatan Website Dan Aplikasi Profesional* (blog), 17 Juli 2019, <https://sevenmediatech.co.id/2019/07/17/bagaimana-denmark-bisa-menjadi-negara-dengan-e-government-terbaik/>.

¹⁵ Dian Fitri Sabrina dan Rosa Ristawati, "The Implementation of Good Governance In The Presidential Election In Indonesia," *Yuridika* 36, no. 2 (2021): 281, <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.21096>.

golongan kecuali sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁶

Negara Denmark meyakini jika kemudahan warga negaranya untuk mendapatkan akses yang mudah pada layanan pemerintah dapat meningkatkan rasa percaya warga negara kepada pemerintah itu sendiri. Dengan demikian agar rasa percaya itu tetap utuh diberikan oleh warga kepada pemerintah, Pemerintah Denmark terus berfokus pada meningkatkan fasilitas digital, salah satunya adalah dalam bentuk keamanan data yang dilindungi dengan diundangkannya *The General Data Protection (Regulation (EU) 2016/679)* (GDPR) dan *The Danish Data Protection Act (Act No. 502 of 23 may 2018)*.

Hal utama dalam berjalannya sistem *e-government* di Denmark adalah adanya kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta dalam membangun sistem pelayanan publik bersama, dimana hal itu menjadi salah satu poin terciptanya suatu pelayanan maksimal kepada masyarakat. Adanya kolaborasi tersebut membuat masyarakat tidak lagi harus bersusah payah dalam mendapatkan pelayanan publik. Suatu sistem yang menjadi sederhana menjadikan pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat tidak berujung pada suatu kesusahan.

Denmark memiliki kunci strategi dalam pembangunan digital, dari semula sistem dibangun untuk informasi masyarakat berkembang kepada jaringan masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi Informasi Denmark menyusun tujuan mengenai proses apa yang akan ditempuh dalam dua dekade selanjutnya, sebagaimana menghasilkan suatu gambaran pemanfaatan teknologi yang maksimal oleh Pemerintah Denmark. Tahapan yang disusun adalah mengenai peralihan kepada sistem digital yakni: *Life-long Learning* dimana Pemerintah Denmark memberi garansi pembelajaran yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui *network society*.

Selanjutnya *Digital Administration*¹⁷ yang dimulai pada tahun 2003 dimana ini membawa dampak perubahan besar dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan maksimal oleh pemerintah Denmark kepada warganya, dan *Danish Internet Initiatives* yang melibatkan partisipasi publik, keterbukaan pengambilan keputusan dan kegiatan kebudayaan yang semuanya bisa diakses oleh warga Denmark melalui jaringan internet.¹⁸

Dalam kemudahan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Denmark untuk warganya adalah dengan melalui penggunaan

¹⁶ Santosa, "Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?"

¹⁷ Morten Falch dan Anders Henten, "Digital Denmark: From information society to network society," *Telecommunications Policy* 24, no. 5 (2000): 380, [https://doi.org/10.1016/S0308-5961\(00\)00028-8](https://doi.org/10.1016/S0308-5961(00)00028-8).

¹⁸ Sector Public, "How Denmark became a global leader in digital government," t.t., <https://queue-it.com/blog/government-digital-transformation-denmark/>.

digital ID yang disebut sebagai NemID, dimana *user* dapat mengakses layanan publik maupun swasta. NemID dikelola oleh perusahaan NETs dan IDE A/S dan mulai digunakan pada tanggal 1 Juli 2010.¹⁹

NemID adalah sebuah digital ID kolaborasi antara Bank Denmark dengan sektor publik Denmark.²⁰ Kolaborasi ini menjadi solusi nasional yang menyediakan keamanan mekanisme *login* pada suatu web yang disambungkan dari *link* dengan digital ID yang disediakan oleh Negara Denmark. NemID memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya mulai dari membuat janji temu dengan dokter, membayar tagihan pajak hingga pada pemesanan jasa untuk menata rambut.²¹

NemID menjadi solusi pelayanan publik satu pintu yang sukses diciptakan oleh Pemerintah Denmark. Direktur agensi digitisasi Rikke Hougaard Zeberg menjelaskan bahwa hal yang luar biasa dalam terciptanya NemID adalah dapat diaksesnya seluruh sektor termasuk pada sektor swasta.²² Saat pengguna melakukan *login* pada *website*, pada saat itu pula semua layanan dapat diakses oleh pengguna dan pengguna hanya perlu mengingat satu nomor identitas dan satu

kode akses untuk dapat merasakan kemudahan pelayanan publik.

Peralihan digitalisasi yang dilakukan selama lebih dari dua dekade oleh Pemerintah Denmark akhirnya terbayarkan, dimana Pemerintah Denmark bisa menyimpan anggaran lebih untuk melakukan peningkatan infrastruktur digital. Di samping itu pula pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah menciptakan kepercayaan warganya. Kemudian hal itu terbayarkan pada saat pandemi Covid-19 melumpuhkan seluruh dunia, Pemerintah Denmark menyatakan bahwa bersiap-siap itu bermanfaat. Oleh karenanya bukan suatu hal yang baru saat Pemerintah Denmark mengharuskan warganya mengakses semua hal melalui elektronik guna membatasi hubungan sosial saat pandemi berlangsung.

Faktor lain yang menjadi penunjang dalam keberhasilan Negara Denmark mewujudkan *e-government* adalah faktor geografis dan jumlah penduduk yang tidak banyak. Adanya 5 juta penduduk tentunya dalam hal ini menjadikan kontrol pemerintah terhadap masyarakat mudah untuk dilakukan. Selain itu menjadikan tingkat pajak yang relatif tinggi dan tingkat keterlibatan sektor

¹⁹ The Agency for Digital Government, "NemID," Lifein denmark.id, 31 Oktober 2023, <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/nemid>.

²⁰ Ojelanki Ngwenyama, Helle Zinner Henriksen, dan Daniel Hardt, "Public Management Challenges In The Digital Risk Society: A Critical Analysis Of The Public Debate On Implementation Of The Danish Nemid," *European Journal of Information Systems* 32, no. 2 (4 Maret 2023): 109, <https://doi.org/10.1080/0960085X.2021.1907234>.

²¹ Santosa, "Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?"

²² Ministry of Foreign Affairs of Denmark, "The Key to Denmark's Digital Success," t.t., <https://denmark.dk/innovation-and-design/denmarks-digital-success>.

publik yang tinggi dalam masyarakatnya.²³ Dengan demikian Pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan infrastruktur jaringan dengan merata dan terjangkau. Penjelasan tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa perkembangan *e-government* di Negara Denmark membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pemerintah Denmark melakukan kerjasama dengan sektor swasta demi mewujudkan sistem pelayanan publik yang maksimal, dimana hal itu juga bermuara pada terciptanya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah.²⁴ Kemudahan pelayanan publik satu pintu dimana setiap warga negara hanya perlu mengingat satu nomor identitas dan satu *security code* menjadi terobosan solutif yang diberikan oleh pemerintah Denmark kepada warganya. Berdasarkan paparan yang telah diuraikan, tidak heran jika Negara Denmark menduduki peringkat nomor satu dengan predikat negara dengan sistem *e-government* terbaik di dunia.

Sistem *E-Government* di Negara Indonesia

E-government adalah pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi dan informasi dalam rangka membangun interaksi baru antar *stakeholders*²⁵ dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.²⁶ *E-government* bersifat *multidisipliner*, artinya tidak hanya ilmu komputer atau elektronik, tetapi juga politik, sosial, manajemen, administrasi publik dan lain-lain.²⁷

Negara Indonesia melakukan peralihan pada sistem digital dimulai pada tahun 2003 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.²⁸ Dalam ketetapan peraturan tersebut, terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu untuk menjawab semua tuntutan perubahan secara efektif dengan memberikan pelayanan publik yang mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas dan aspirasi mereka didengar. Di Negara Indonesia penyelenggaraan

²³ Santosa, "Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?"

²⁴ Panca Setyo Prihatin, Pahmi Amri, dan Agung Wicaksono, "Public service transformation trough digital-based services during Covid-19 pandemic in Riau Province, Indonesia," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (30 April 2023): 114, <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.9861>.

²⁵ Kartika Setianingrum, H. I. Nyoman Sumaryadi, dan Ella Wargadinata, "Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat," *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 12, no. 4 (2020): 150, <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.344>.

²⁶ Mega Oktavia Budi Ratnasari, Irwan Noor, dan Firda Hidayati, "Analisis Pengembangan E-Government Pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi Pada 'SURADI' Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 8, no. 1 (11 April 2022): 40, <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.4>.

²⁷ Ratnasari, Noor, dan Hidayati, 40.

²⁸ Ana Maria Sri Hariyati dkk., "Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik Di Kecamatan Pulomerak)," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 4, no. 3 (14 Desember 2022): 205, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.360>.

pelayanan publik menjadi isu krusial, perbaikan pelayanan publik di Negara Indonesia cenderung tidak membawa perubahan, padahal implikasinya berdampak kepada banyak sektor, seperti sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain.²⁹

Sejauh ini pembaharuan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia demi maksimalnya capaian sistem pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.³⁰ Jika dalam hal ini Negara Indonesia mampu mengelola dengan baik, maka akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog, berpartisipasi, dan termotivasi sebagai mitra pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi:

“Dalam hal untuk memberikan suatu dukungan informasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik perlu adanya suatu sistem informasi yang bersifat nasional lebih lanjut dijelaskan pada ayat (4) Pelayanan Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non Elektronik yang sekurang-kurangnya

terdapat; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja.”

Peralihan menuju *electronic-digital* dewasa ini mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tiap sektor pemerintahan sudah melakukan restrukturisasi sistem dari manual kepada digital.³¹ Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan pada pemerintah dengan penekanan pada peningkatan kinerja di semua tingkat pemerintahan.³² Tiap lembaga berlomba memberikan akses mudah dengan memfasilitasi pelayanan *online* melalui *website* ataupun aplikasi. Tentu hal itu tidak lepas dari suatu permasalahan yang dirasakan pada tiap sistem yang dikembangkan. *electronic-digital* tentunya banyak membawa dampak positif, namun hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan.³³

Pemerintah dapat mengadopsi sistem ini ke dalam bentuk upaya perwujudan *good governance*³⁴ yang transparan dan

²⁹ Abdul Mahsyar, “Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik,” *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (14 Oktober 2011): 82, <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>.

³⁰ Martitah Martitah dkk., “Confronting E-Government Adoption in Indonesian Local Government,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 2 (30 November 2021): 286, <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.47795>.

³¹ Ronny Winarno dan Endang Retnowati, “Good Governance Based Public Services,” *Notariil Jurnal Kenotariatan* 4, no. 1 (15 Juli 2019): 10, <https://doi.org/10.22225/jn.4.1.1155.8-17>.

³² Sabino Mariano, “Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1692.

³³ Lidya Agustina dkk., *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia (Stratategi dan Sektor Potensial)* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), 2.

³⁴ Joko Tri Nugraha, “E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman,” *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 2 (2018): 39.

akuntabel.³⁵ *E-government* memberikan kesempatan dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu sinergi antara pemerintah dan masyarakat dengan membuat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya menjadi semakin lancar, semakin mudah, dan semakin tepat guna.³⁶

Pemerintah menciptakan strategi tata kelola pemerintah yang baik tentunya tidak lepas daripada penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁷ Hal itu agar suatu sistem baru yang dibangun yakni sistem digital tetap berjalan sebagaimana yang dicita-citakan berlangsung dengan efisien, efektif, dan ekonomis.³⁸

Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)³⁹ merupakan sebuah landasan bagi pemerintah tentang bagaimana seharusnya pemerintah melakukan pengelolaan dan pengendalian

terhadap pemerintahan yang baik, adil, sopan, dan terbebas dari suatu pelanggaran aturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan kezaliman.⁴⁰ AUPB diisyaratkan sebagai rambu bagi para pelaksanaan negara dalam menjalankan tugasnya.⁴¹ Salah satu prinsip *good governance* yang utama yaitu akuntabilitas (*accountability*) yang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kinerja yang dilakukannya untuk pelayanan masyarakat.⁴²

Perkembangan pelayanan publik berbasis teknologi atau *e-government* di Indonesia masih terbilang cukup lambat,⁴³ pasalnya banyak persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai suatu keberhasilan penerapan *e-government* ini. Indonesia harus mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur

³⁵ Lia Muliawaty dan Shofwan Hendryawan, "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (1 Juli 2020): 50, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>.

³⁶ Andi Fitri Rahmadany, "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-government dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 13, no. 1 (2021): 122.

³⁷ Indie Winarwatie Wartiningih dan Rina Yulianti, *Perbandingan Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2009), 119.

³⁸ Vani Wirawan, "Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 10, <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.

³⁹ Rahmawati Ermalena dan I Ketut Suardita, "Penerapan Asas Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009," *Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2009, 3.

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 234.

⁴¹ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 555.

⁴² Muhammad Mudhofar, "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (28 April 2022): 23, <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>.

⁴³ Herpita Wahyuni, Ulung Pribadi, dan Danang Eko Prastya, "The Success of E-Government as A Public Service System in South Bengkulu Regency," *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities* 4, no. 3 (30 September 2022): 228, <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.3.221-236>.

jaringan yang belum merata.⁴⁴ Tidak lepas dari isu mengenai perlindungan data pribadi jika bersinggungan dengan internet. Demi tercapainya suatu pelayanan publik yang optimal, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Aturan ini dapat menjadi landasan bagi isu kebocoran data pribadi dalam hal berkaitan dengan pelayanan publik berbasis elektronik.⁴⁵

Seyogyanya peralihan *e-government* memungkinkan tercapainya kemudahan oleh masyarakat⁴⁶ dalam pelaksanaan pelayanan publik.⁴⁷ Namun, di Indonesia poin dari kemudahan yang dicita-citakan *e-government* belum dapat tercapai,⁴⁸ karena tiap lembaga pemerintah mengeluarkan suatu sistem layanannya masing-masing dimana tiap pengguna diharuskan melakukan *login* pada setiap akan melakukan pelayanan di lembaga pemerintah.

Pada faktanya ditemukan satu lembaga yang mempunyai dua sistem untuk

terlaksananya pelayanan publik. Suatu kemudahan yang dicita-citakan berujung pada suatu kesusahan lain. Seharusnya *e-government* menjadi suatu terobosan kemajuan dalam sektor pelayanan publik, bukan menjadi suatu kesusahan lain. Banyak perbaikan yang masih harus di tempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan publik.⁴⁹ Kesusahan lain pun dirasakan dimana adanya perbedaan mengenai pelayanan publik pemerintah dengan sektor swasta.⁵⁰

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk pengaplikasian pelayanan publik nasional, dipertegas dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi

⁴⁴ Andi Fitri Rahmadany, "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-government dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 13, no. 1 (2021): 122.

⁴⁵ Rafrini Amyulianthy dkk., "Can Good Governance Enhance Local Government Performance?," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 7, no. 1 (2023): 50, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i1.5231>.

⁴⁶ Arih Setyaningrum, Evi Satispi, dan Risya Amalia, "Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Pada Direktorat Jenderal Kependudukan&Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri," *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.504>.

⁴⁷ Putri Auliyaa, Rahmat Hidayat, dan Rudyk Nababan, "Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian," *Kinerja* 18, no. 4 (2022): 505, <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9804>.

⁴⁸ Heru Rochmansjah, "Application of Good Governance Principles in Government: Perspective of Public Services," *International Journal of Science and Society* 1, no. 4 (2019): 5, <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v1i4.140>.

⁴⁹ Tonye Clinton Jaja dan Zaka Firma Aditya, "Promoting the Good Governance By Advancing the Role of Parliamentarians and the Term Offices Limitation (Comparing Nigeria and Indonesia)," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 277, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54776>.

⁵⁰ Gebrill Kimberly Pendong, Yuansi Ester Tumilaar, dan I Gusti Agung Musa Budidarma, "The Effect of Good Corporate Governance on Banking Profitability," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 5 (2022): 757, <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i5.488>.

Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).⁵¹ Dalam pembentukannya SIPPN hanya sebagai wadah sarana informasi mengenai pelayanan publik, bukan sebagai suatu aplikasi penyedia jasa layanan publik. Namun dengan sarana seperti ini, masyarakat akan memperoleh informasi yang mudah untuk dijangkau.

Oleh karenanya suatu pencapaian pelayanan publik yang diharapkan oleh

masyarakat di Negara Indonesia masih belum mencapai pada apa yang dicita-citakan *e-government* dalam menuju *good governance*.⁵² Indonesia masih harus melakukan pembaruan dan meningkatkan inovasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang maksimal berbasis elektronik.⁵³

Tabel 1: Perbandingan Sistem E-Government Indonesia dan Denmark

No	Sistem <i>e-government</i> di Negara Indonesia	Sistem <i>e-government</i> di Negara Denmark
1	Untuk tiap aplikasi layanan yang disediakan oleh pemerintah menggunakan ID yang berbeda	Menggunakan satu ID untuk mengakses seluruh layanan publik yang di sediakan oleh pemerintah
2	Tidak ada kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam mewujudkan pelayanan publik	Pemerintah bekerjasama dengan swasta dalam mewujudkan sistem <i>e-government</i>
3	Pembangunan infrastruktur internet belum merata	Pembangunan infrastruktur jaringan internet sudah merata
4	Layanan Satu Pintu tercipta dalam berbagai instansi pemerintah	Layanan Satu pintu tercipta hanya satu dari pemerintah yang dapat diakses dengan NemID

Sumber: dianalisis dari sumber primer

⁵¹ Burhan Muhammad, "No TitleProyeksi Pelayanan Publik ERA 4.0," <https://ombudsman.go.id>, 2018.

⁵² Hesi Eka Puteri, "Good Corporate Governance, Leverage and Corporate Financial Performance in the Jakarta Islamic Index," *International Journal of Indonesian Business Review* 2, no. 2 (2023): 111.

⁵³ Arwanto Arwanto dan Wike Anggraini, "Good Governance, International Organization and Policy Transfer: A Case of Indonesian Bureaucratic Reform Policy," *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 26, no. 1 (2022): 33, <https://doi.org/10.22146/jkap.68703>.

KESIMPULAN

Negara Denmark memiliki sistem pelayanan publik (pelayanan administrasi dan pelayanan jasa) yang jauh lebih maju dari Negara Indonesia, dimana hanya dengan satu ID dan satu sandi masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Keberhasilan Negara Denmark dalam mencapai *e-government* juga didukung dengan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, dengan adanya kerjasama tersebut pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik di Negara Indonesia masih jauh dari kata maksimal, pasalnya pelayanan publik yang ada masih tercerai berai. Masing-masing daripada lembaga negara memiliki *website* maupun aplikasi tersendiri sebagai sarana pelayanan publik *online*. Hal itu dirasa kurang memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena masyarakat harus mengingat setiap ID maupun sandi dari tiap lembaga penyedia layanan publik.

SARAN

Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi sistem pelayanan publik dari pemerintah Denmark dengan cara menyederhanakan sistem yang telah ada. Dimana sistem yang telah disediakan oleh pemerintah dapat memenuhi ekspektasi daripada masyarakat, dengan kemudahan mengakses segala layanan publik melalui satu ID dan satu sandi. Pemerintah Indonesia dapat

membuat suatu *website* ataupun aplikasi yang menyediakan seluruh layanan publik dari seluruh lembaga di Indonesia, mulai dari pelayanan administrasi hingga pada pelayanan jasa. Kemudian mewajibkan tiap warga negara menggunakan hanya satu *website* maupun satu aplikasi tersebut yang dengan mudah bisa membawa masyarakat Indonesia memenuhi segala kebutuhan pelayanan publik. Sehingga cita-cita *e-government* menuju *good governance* dapat tercapai dan meningkatkan rasa percaya masyarakat Indonesia terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Wendra, Harmawan Susetiyana, Oktarina Maharani, dan Harry Azhar Azis. "E-Government Effectiveness in Combating Corruption and Improving Public Service." *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 01 (2020): 28–42.
- Agustina, Lidya, De de Mahmudah, Ahmad Budi Setiawan, Rieka Mustika, Amri Dunan, dan Atjih Ratnawati. *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia (Strategi dan Sektor Potensial)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019.
- Arih Setyaningrum, Evi Satispi, dan Risyah Amalia. "Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Pada Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri." *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (2023): 48–60.

- <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.504>
- Arwanto, Arwanto, dan Wike Anggraini. "Good Governance, International Organization and Policy Transfer: A Case of Indonesian Bureaucratic Reform Policy." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 26, no. 1 (2022): 33. <https://doi.org/10.22146/jkap.68703>.
- Auliyaa, Putri, Rahmat Hidayat, dan Rudyk Nababan. "Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian." *Kinerja* 18, no. 4 (2022): 502–12. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9804>.
- Ermalena, Rahmawati, dan I Ketut Suardita. "Penerapan Asas Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009." *Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2009, 1–5.
- Falch, Morten, dan Anders Henten. "Digital Denmark: From information society to network society." *Telecommunications Policy* 24, no. 5 (2000): 377–94. [https://doi.org/10.1016/S0308-5961\(00\)00028-8](https://doi.org/10.1016/S0308-5961(00)00028-8).
- Government, the Agency for Digital. "NemID." *Lifein denmark.id*, 31 Oktober 2023. <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/nemid>.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Disunting oleh Irfani dan Erham Amin. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Hariyati, Ana Maria Sri, Indah Nurayuni, Ismi Syarifatus Sa'diyah, Augustin Rina Herawati, dan Kismartini Kismartini. "Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik Di Kecamatan Pulomerak)." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 4, no. 3 (14 Desember 2022): 203–8. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.360>.
- Humas MENPANRB. "Indonesia Naik 11 Peringkat hasil Survei E-government PBB." *menpan.go.id*, 2022. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-11-peringkat-hasil-survei-e-government-pbb>.
- Ishak, Nurfaika. "Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (30 Juni 2022): 71–88. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834>.
- Jaja, Tonye Clinton, dan Zaka Firma Aditya. "Promoting the Good Governance By Advancing the Role of Parliamentarians and the Term Offices Limitation (Comparing Nigeria and Indonesia)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 265–98. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54776>.
- Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Disunting oleh 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Mahsyar, Abdul. "Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (14 Oktober 2011): 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>.
- Mariam, Mariam, dan Imanudin Kudus. "Analisis Penerapan Electronic Government (E-Gov) Di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung." *Neo Politea* 3, no. 2 (12 Agustus 2022): 39–50.

- <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v3i2.1081>.
- Martitah, Martitah, Saru Arifin, Slamet Sumarto, dan Widiyanto Widiyanto. "Confronting E-Government Adoption in Indonesian Local Government." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 2 (30 November 2021): 279–306. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.47795>.
- Michaels, Ralf. *The Functional Method of Comparative Law*. Carolina Utara: Duke Law School, 2006.
- Ministry of Foreign Affairs of Denmark. "The Key to Denmark's Digital Success," t.t. <https://denmark.dk/innovation-and-design/denmarks-digital-success>.
- Mudhofar, Muhammad. "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (28 April 2022): 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>.
- Muhammad, Burhan. "No TitleProyeksi Pelayanan Publik ERA 4.0." <https://ombudsman.go.id>, 2018.
- Muliawaty, Lia, dan Shofwan Hendryawan. "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelyanan Publik Kabupaten Sumedang." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (1 Juli 2020): 45–57. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>.
- Ngwenyama, Ojelanki, Helle Zinner Henriksen, dan Daniel Hardt. "Public Management Challenges In The Digital Risk Society: A Critical Analysis Of The Public Debate On Implementation Of The Danish Nemid." *European Journal of Information Systems* 32, no. 2 (4 Maret 2023): 108–26. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2021.1907234>.
- Nugraha, Joko Tri. "E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 2 (2018): 32–42.
- Pendong, Gebrill Kimberly, Yuansi Ester Tumilaar, dan I Gusti Agung Musa Budidarma. "The Effect of Good Corporate Governance on Banking Profitability." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 5 (2022): 753–70. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i5.488>.
- Prihatin, Panca Setyo, Pahmi Amri, dan Agung Wicaksono. "Public service transformation trough digital-based services during Covid-19 pandemic in Riau Province, Indonesia." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (30 April 2023): 111–24. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.9861>.
- Puteri, Hesi Eka. "Good Corporate Governance, Leverage and Corporate Financial Performance in the Jakarta Islamic Index." *International Journal of Indonesian Business Review* 2, no. 2 (2023): 104–16.
- Rahmadany, Andi Fitri. "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-government dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 13, no. 1 (2021): 118–25.
- Ratnasari, Mega Oktavia Budi, Irwan Noor, dan Firda Hidayati. "Analisis Pengembangan E-Government Pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi Pada 'Suradi' Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 8, no. 1 (11 April 2022): 35–44.

- <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.4>.
- Rochmansjah, Heru. "Application of Good Governance Principles in Government: Perspective of Public Services." *International Journal of Science and Society* 1, no. 4 (2019): 1–8. <https://doi.org/10.54783/ij soc.v1i4.140>.
- Sabrina, Dian Fitri, dan Rosa Ristawati. "The Implementation of Good Governance In The Presidential Election In Indonesia." *Yuridika* 36, no. 2 (2021): 281. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.21096>.
- Santosa, Ardika. "Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?" *Jasa Pembuatan Website Dan Aplikasi Profesional* (blog), 17 Juli 2019. <https://sevenmediatech.co.id/2019/07/17/bagaimana-denmark-bisa-menjadi-negara-dengan-e-government-terbaik/>.
- Sector Public. "How Denmark became a global leader in digital government," t.t. <https://queue-it.com/blog/government-digital-transformation-denmark/>.
- Setianingrum, Kartika, H. I. Nyoman Sumaryadi, dan Ella Wargadinata. "Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat." *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 12, no. 4 (2020): 843–54. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.344>.
- Setyasih, Endang Try. "Implementation of Good Governance in Public Services in Blanakan District, Subang Regency." *Endless: International Journal of Future Studies* 6, no. 1 (23 Februari 2023): 157–67. <https://endless-journal.com/index.php/endless/article/view/133>.
- Setyowati, Desy. "Kominfo Luncurkan Kembali Portal Indonesia.go.id - Katadata.co.id." *Katadata.co.id*. Diakses 23 Desember 2023. <https://katadata.co.id/digital/nasional/5e9a558d0d5e6/kominfo-luncurkan-kembali-portal-indonesiagoid>.
- Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni Bandung, 1979.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ulfah, Maria. *Perbandingan Sistem Hukum*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022.
- Ummah, Aniqotul, Siti Maryam, dan Danis Tri Saputra Wahidin. "E-Government Implementation to Support Digital Village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 6 (2022): 245–59.
- Wahyuni, Herpita, Ulung Pribadi, dan Danang Eko Prastya. "The Success of E-Government as A Public Service System in South Bengkulu Regency." *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities* 4, no. 3 (30 September 2022): 221–36. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.3.221-236>.
- Wartiningsih, Indie Winarwatie, dan Rina Yulianti. *Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2009.

- Winarno, Ronny, dan Endang Retnowati. "Good Governance Based Public Services." *Notariil Jurnal Kenotariatan* 4, no. 1 (15 Juli 2019): 8–17. <https://doi.org/10.22225/jn.4.1.1155.8-17>.
- Wirawan, Vani. "Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.